

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TEKANAN EKSTERNAL,
KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,DAN
KOMITMENMANAJEMEN TERHADAP
PENERAPANTRANSPARANSI
PELAPORANKEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

Oleh :

M. Arif Syarmenda

Pembimbing: M. Rasuli dan Volta Diyanto

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : syarmendagaek@gmail.com

*Effect of Accountabillity,external pressure, the uncertainty
of the environment, and the management's commitment
with respect to the application transparancy
of financial reporting
(Study on the unit of work local device Indragiri Hulu)*

ABSTRACT

The transparency of financial reporting requires that the organization to present the financial statements are free of material false and biased information to outside parties. This is in accordance with the concept of reliability of the information in the financial statments to be free of errors and misleading understanding of the material, presenting any facts honestly, and can be verified. Transparency can be affected by accountability, external pressure, the uncertainty of the environment, and management commitment. This research was conducted in the city with the object of research is the Indragiri Hulu department, agencies, and offices in Indragiri Hulu by 28 workers work unit of local government. Samples taken in this study were 84 respondents. Data collection is carried out using a questionnaire which is then analyzed using linear regression. Test results showed accountability influence significant .037 ,external pressure .004, the uncertainty of the environment .002, and management commitment .015. Influence of the application of the transparency of financial reporting in the goverment of Indragiri Hulu. The magnitude of the influence accountability external pressure, the uncertainty of the environment, and management commitment for the implementation of govermental financial reporting transperency Indragiri Hulu was 50,2 %.

Keywords : Accountability, External Pressure, Environmental Uncertainty, Commitment, Transparancy and Financial report

PENDAHULUAN

Transparansi mengenai
pengelolaan keuangan pemerintah

menjadi sangat penting pada era
otonomi daerah pada saat ini.
Perkembangan otonomi daerah di
Indonesia pada saat ini

mencerminkan adanya respon rakyat sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Untuk mewujudkan *good governance*, salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat itu sendiri (Aliyah, 2012).

Hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun – tahun sebelumnya.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak atas penyajian saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, saldo asset tetap, saldo asset lainnya, dalam semua hal yang material, untuk posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kasus yang terjadi tentang adanya tuntutan transparansi pelaporan keuangan daerah mengakibatkan kata “Transparan” seakan hanya mudah untuk

dikatakan tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Sampai saat ini penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah juga belum banyak dilakukan, sehingga sebagian orang menganggap bahwa transparansi itu hanya sebatas pada publikasi dari laporan keuangan saja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang transparansi pelaporan keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 2) Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 3) Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 4) Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. 2) Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. 4) Pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (Tahun 2002), Transparan adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam

membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggung jawaban horisontal (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, Transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Silver (2005) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau di rilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti tentang informasi sumber daya perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Akuntabilitas

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Adha (2013)). Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2004).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, pejabat dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas dapat meningkatkan resiko berinvestasi, dan juga mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana

pencapaian hasil-hasil serta bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 58 Ayat (1) dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh.

Tekanan Eksternal

Menurut Eko (2013) "Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang di berikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau system". Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Disisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi Scott dalam Arsyadi (2012) agar organisasi terlihat baik oleh pihak luar organisasi.

Menurut frumkin dan galaskiewicz (2006) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian Lingkungan merupakan keterbatasan individu

dalam menilai probabilitas gagal atau berhasil keputusan yang telah dibuat Duncan (dalam Kartika, 2010). Ketidakpastian lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi disekitar sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan Adha (2013). Pada kondisi ketidakpastian tinggi, maka individu sulit memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang di buatnya (Ashworth,2009).

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan. Ketidakpastian lingkungan merupakan persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi.

Duncan (dalam Kartika, 2010) mendefinisikan lingkungan sebagai totalitas faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuatan keputusan seseorang dalam organisasi. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitar sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan tersebut (Adha 2013).

Komitmen Manajemen

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut Soekidjan, 2009 dalam Adha (2013).

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Komitmen manajemen yang dikemukakan oleh Mowday et al (1982) dalam Adha (2013). ini memiliki ciri-ciri yaitu (1) keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun badan-badan

yang dipilih atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. (Budi Mulyana, 2006). Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2001) menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.

Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Suparno (2011) menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, masih belum mampu berpengaruh signifikan pada peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Dumai.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang penting terhadap transparansi kepada publik, sehingga jika suatu pemerintah daerah berani dan mampu menerapkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya juga semakin tinggi

Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan analisa konten terhadap transkrip wawancara dan respon respon yang di pilih, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi keuangan di SKPD yang ada di provinsi D.I Yogyakarta di pengaruhi oleh

tekanan eksternal (Ridha & Basuki,2012) Tekanan Eksternal berupa undang undang atau peraturan menjadi pendorong untuk di terapkannya transparansi pelaporan keuangan di satuan kerja perangkat daerah provinsi yang ada di wilayah D.I Yogyakarta.

Transparansi adalah melakukan semua pencatatan dan melaporkan pengelolaan keuangan dengan apa adanya. Transparansi di tunjukan agar semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui kemana alokasi dana digunakan dan apakah telah sesuai dengan peraturan pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

Peraturan dan perundang undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk koersif untuk terciptanya transparansi pelaporan keuangan. Jadi, adanya peraturan dan perundang undangan mengakibatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan yang relatif sama antara SKPD yang satu dengan yang lainnya.

Pengaruh ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal diluar organisasi seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya. Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindarajan,1984) dalam Arsyadi (2012).

Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada

pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang akan dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein,1999) dalam Wendi (2013).

Hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dalam penelitian Arsyadi (2012) menunjukan hasil yang tidak konsisten, yaitu ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapn transparansi pelaporan keuangan.Ketidakpastian lingkungan pada kenyataan terjadi dan dialami oleh SKPD. Ketidakpastian lingkungan yang muncul dapat disebabkan oleh sering terjadinya perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan. Hal ini akan berdampak pada sulitnya SKPD untuk segera menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru.

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

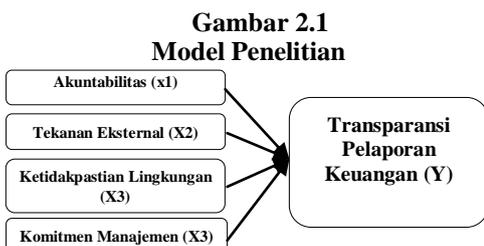
Paine (1994) dalam Arsyadi (2012) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut dari pada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan

terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin, 2002).

Penelitian yang dilakukan Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan Transparansi keuangan di SKPD yang ada di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Hampir keseluruhan di SKPD memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menerapkan Transparansi Pelaporan Keuangan. Dalam Pelaporan Keuangan, SKPD tidak hanya melaporkan informasi yang hanya bersifat positif saja bagi SKPD berupa capaian, akan tetapi juga ketidaktercapaian (Arsyadi, 2012).

Adanya peraturan dan perundang undangan hanya sebagai pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Dalam jangka panjang, penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan komitmen dari manajemen SKPD untuk terus belajar guna memahami dan menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru. Berdasarkan Teori tersebut, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di pengaruhi oleh komitmen manajemen.

Model Penelitian



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H₁:** Akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- H₂:** Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- H₃:** Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- H₄:** Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas, badan, kantor, dan kecamatan pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hulu yang berlokasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di kabupaten Indragiri Hulu, berjumlah 28 SKPD yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas, badan, kantor, RSUD, dan kecamatan.

Sampel pada penelitian ini adalah Pejabat eselon 2 dan 3 pada SKPD pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 28 SKPD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner (*mail questioner*) yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden pada 28 satuan kerja pemerintah di Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari referensi referensi dari buku, internet, atau pun dari instansi terkait.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

1. Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (ghozali, 2002). Uji Validitas dilakukan dengan sistem analisis item, dimana setiap nilai yang diperoleh untuk setiap item dikorelasikan dengan nilai total seluruh item suatu variabel. Uji validitas dilakukan dengan melihat r_{tabel} . Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n). Nilai r_{tabel} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r_{hitung} untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel

akan menunjukkan instrumen yang dapat dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dapat diandalkan pula. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan koefisien *cronbach alpha* untuk mengestimasi validitas setiap skala (indikator observarian). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alpa lebih dari 0.60.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (ghozali,2005).

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor*(VIF) untuk tiap tiap variabel independen. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $< 0,10$ berarti sampel terdapat multikonilearitas (Ghozali,2005).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data *time series* (runtut waktu). Pada data *cossection* (silang waktu) masalah autokorelasi relatif jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).

Adapun untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan tes statistik Durbin Watson yaitu :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif,
2. Angka D-W diantara -2 sampai 2, berarti tidak ada autokorelasi, dan
3. Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negative

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan.

3. Analisis Regresi Berganda

Regresi Linier Berganda

Uji Hipotesis ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang dinyatakan sebelumnya. Dalam hal ini kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran mengenai nyata atau tidaknya hubungan antara akuntabilitas ketidakpastian lingkungan dan komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Tekanan eksternal

X_3 = Ketidakpastian lingkungan

X_4 = Komitmen Manajemen

Y = Transparansi Pelaporan Keuangan

e = Standar Error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Untuk melihat tingkat pengembalian kuisoner dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuisoner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuisoner yang dikirimkan	84	100%
Jumlah kuisoner kembali	75	89,28%
Jumlah kuisoner yang tidak kembali	9	10,72%
Jumlah kuisoner yang dapat diolah	75	89,28%

Sumber: Data Olahan (2015)

Demografi Responden

Untuk melihat karakteristik umur responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden

No	Umur	Fk	Presentase
1	25 –35 tahun	12	16 %
2	36-45 tahun	26	34,67 %
3	46-55 tahun	25	33,33%
4	56-65 tahun	12	16 %
Total		75	100 %

Sumber : Data Olahan (2015)

Untuk mengetahui karakteristik jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	62	82,67%
2	Perempuan	13	17,33%
Total		75	100%

Sumber : Data Olahan (2015)

Untuk mengetahui lama masa kerja responden, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Masa Kerja

NO	Masa Kerja	Fk	Presentase
1	1 - 5 tahun	35	46,67 %
2	6 -10 tahun	25	33,33 %
3	> 10 tahun	15	20 %
Total		75	100 %

Sumber : Data Olahan (2015)

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 75, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,224. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan valid dan sebaliknya. Berikut ini beberapa tabel hasil uji validitas data masing masing variable.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		r_{hitung}	r_{tabel}	
1.	AKT 1	0.792	0,224	Valid
2.	AKT 2	0.796	0,224	Valid
3.	AKT 3	0.854	0,224	Valid
4.	AKT 4	0.645	0,224	Valid
5.	AKT 5	0.823	0,224	Valid
6.	AKT 6	0.547	0,224	Valid
7.	AKT 7	0.496	0,224	Valid
8.	AKT 8	0.422	0,224	Valid
9	AKT 9	0.744	0,224	Valid

Sumber : Data Olahan (2015)

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Eksternal (X2)

No	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		r_{hitung}	r_{tabel}	
1	TE 1	0.630	0,224	Valid
2	TE 2	0.360	0,224	Valid
3	TE 3	0.569	0,224	Valid
4	TE 4	0.659	0,224	Valid
5	TE 5	0.377	0,224	Valid

Sumber : Data Olahan (2015)

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Ketidaktahuan Lingkungan (X3)

No	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		r_{hitung}	r_{tabel}	
1	KL 1	0.553	0,224	Valid
2	KL 2	0.873	0,224	Valid
3	KL 3	0.638	0,224	Valid
4	KL 4	0.629	0,224	Valid

Sumber : Data Olahan (2015)

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Manajemen (X4)

No	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		r_{hitung}	r_{tabel}	
1	KM 1	0.639	0,224	Valid
2	KM 2	0.350	0,224	Valid
3	KM 3	0.666	0,224	Valid

4	KM 4	0,722	0,224	Valid
5	KM 5	0,560	0,224	Valid

Sumber : Data Olahan (2015)

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Variabel
Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)

No	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		r _{hitung}	r _{tabel}	
1	TPK 1	0,372	0,224	Valid
2	TPK 2	0,309	0,224	Valid
3	TPK 3	0,463	0,224	Valid
4	TPK 4	0,537	0,224	Valid
5	TPKI 4	0,505	0,224	Valid

Sumber : Data Olahan (2015)

2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Batasan untuk uji reliabilitas adalah 0,6. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 10
Hasil Reabilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	ukuran Reliabel	Keterangan
1	Transparansi Pelaporan Keuangan	0,79	0,60	Reliable
2	Akuntabilitas	0,85	0,60	Reliable
3	Tekanan Eksternal	0,70	0,60	Reliable
4	Ketidakpastian Lingkungan	0,61	0,60	Reliable
5	Komitmen Manajemen	0,64	0,60	Reliable

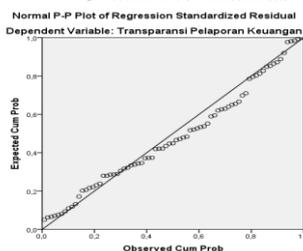
Sumber : Data hasil penelitian

Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas data dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data adalah terpenuhi. Dan berdasarkan gambar 2 berikut diketahui bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1
Grafik Normalitas



Sumber: Output SPSS (Data Olahan, 2015)

2. Uji Multikolinearitas

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Jika nilai *VIF* > 10 atau nilai *Tolerance* < 0,10 berarti terdapat multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini:

Tabel 11
Hasil Uji Multikolinearitas

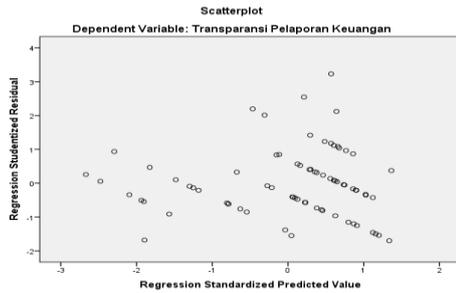
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Akuntabilitas	,745	1,343
	Tekanan Eksternal	,943	1,060
	Ketidakpastian Lingkungan	,648	1,543
	Komitmen Manajemen	,804	1,244

Sumber: Output SPSS (Data Olahan, 2015)

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan Pengujian Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadikesamaan varians dan residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedestisitas



Sumber: *Output SPSS (Data Olahan, 2015)*

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian Autokorelasi dengan melihat nilai DW.

Tabel 12
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	D-W
1	,709 ^a	,502	,474	,986	1,368

Sumber: *Data Olahan 2015*

Hasil Pengujian Model Regresi

Tabel 13
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,681	1,793		3,725	,000
Akuntabilitas	,068	,032	,208	2,129	,037
Tekanan Eksternal	,184	,061	,262	3,016	,004
Ketidapastian Lingkungan	,260	,083	,329	3,144	,002
Komitmen Manajemen	,177	,071	,235	2,501	,015

Sumber: *Data Olahan 2015*

Berdasarkan Tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 6,681 + 0,068X_1 + 0,184X_2 + 0,260X_3 + 0,177X_4 + e$$

Pembahasan Hasil Penelitian Hasil Pengujian Hipotesis Satu (Akuntabilitas)

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\ value\ (sign) < 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ $p\ value\ (sign) > 0,05$ maka H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 15 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,129 dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n-1$ ($75-1=74$) sebesar 1,992. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} (2,129) > t_{tabel} (1,992)$ dan $p\ value (0,037) < \alpha (0,05)$. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil Pengujian Hipotesis Dua (Tekanan Eksternal)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 15 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 3,016 dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n-1$ ($75-1=74$) sebesar 1,992. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} (3,016) > t_{tabel} (1,992)$ dan $p\ value (0,004) < \alpha (0,05)$. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil Pengujian Hipotesis Tiga (Ketidakpastian Lingkungan)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 15 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 3,144 dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df=n-1$ ($75-1=74$) sebesar 1,992. Dengan demikian diketahui t_{hitung} ($3,144$) > t_{tabel} ($1,992$) dan p value ($0,002$) < α ($0,05$). Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil Pengujian Hipotesis Empat (Komitmen Manajemen)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 15 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,501 dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df=n-1$ ($75-1=74$) sebesar 1,992. Dengan demikian diketahui t_{hitung} ($2,501$) > t_{tabel} ($1,992$) dan p value ($0,015$) < α ($0,05$). Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk regresi dengan variabel independen lebih dari 2, digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinansi. Untuk melihat besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat hasil

pengujian koefisien determinasi pada tabel berikut :

Tabel 14
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	D-W
1	,709 ^a	,502	,474	,986	1,368

Sumber: Data Olahan (2015)

Dari Tabel 14 di atas diperoleh R Square (R^2) sebesar 0,502. Dengan demikian variabel Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen hanya dapat menjelaskan variabel Transparansi Pelaporan Keuangan sebesar 50,2%. Sedangkan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan sebesar ,037 terhadap Transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menjelaskan, jika Akuntabilitas meningkat, maka Transparansi juga meningkat. Sehingga Akuntabilitas dapat membantu penerapan transparansi pelaporan keuangan dilingkungan SKPD di Indonesia, khususnya pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. 2) Hasil ini juga menunjukkan bahwa Tekanan Eksternal memiliki pengaruh signifikan sebesar ,004 terhadap Transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menjelaskan, jika Tekanan Eksternal meningkat, maka

Transparansi juga meningkat. 3) Hasil ini menunjukkan bahwa Ketidakpastian Lingkungan memiliki pengaruh signifikan sebesar ,002 terhadap Transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menjelaskan, jika Ketidakpastian Lingkungan meningkat, maka Transparansi juga meningkat. (4) Hasil ini menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen memiliki pengaruh signifikan sebesar ,015 terhadap Transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menjelaskan, jika Komitmen Manajemen meningkat, maka Transparansi juga meningkat. Sehingga Komitmen Manajemen dapat membantu penerapan transparansi pelaporan keuangan dilingkungan SKPD di Indonesia, khususnya pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah 1) Penelitian dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya dengan mengambil sampel pada SKPD yang ada di kota/kabupaten lainnya bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas. 2) Kemudian Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, wendi, 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan & Komitmen Manajemen terhadap penerapan Transparansi Pelaporan keuangan daerah kota Dumai.
- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.
- Asworth, R.,G.Boyne dan R.Delbridge.2009.Escape from the iron cage? Organization change and Isomorphic pressure in the public sector. *Journal of public administration research and theor.*
- Dacin,M.T.,J. Goodstein., dan W. R Scott. 2002. Institutional Theory and Institutional change: Introduction to the special research forum. *The Academy of Management Journal.*
- Duncan, R. B., (2004), Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, *Administrative Science Quarterly*, pp. 313-327.

- Frumkin, P. Dan J. Galaskiewicz. 2004. *Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations*. *Jurnal of publik Administration Research and Theory*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- Ghozali, Imam. 2002. *Statistik-non Parametric: Teori dan Aplikasi Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika, Andi. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran*. *Kajian Akuntansi*, Februari 2010, Hal: 39 - 60 Vol. 2 No. 1
- Lembaga Administrasi Negara, 2001. *Peraturan tentang Organisasi*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: good Governance Democration Local Government Financial Manajemen Transparency Public Police*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di
- Mulyono, Budi, 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, Mei.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 2012
- Robbins, S., dan Timothy A. J., 2008, *“Perilaku Organisasi, Organizational Behaviour”*, *Buku Terjemahan, Jakarta : Gramedia*.
- Silver, D. 2005. *Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. Public Relations Strategist*.
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Study kajian pada pemerintahan kota Dumai*.